



Katalog BPS : 4102002.5103

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) KABUPATEN BADUNG TAHUN 2009



BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BADUNG

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

KABUPATEN BADUNG TAHUN 2009

ISBN : -
No. Publikasi : 51032.001
Katalog BPS : 4102002.5103
Ukuran Buku : 21 cm x 29 cm
Jumlah Halaman : 33 + vii Halaman

Naskah : Seksi Statistik Sosial

Penyunting : Seksi Statistik Sosial

Diterbitkan oleh :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung

Jln. Mulawarman No. 11, Telp (0361) 437519, Fax (0361) 411887,

Denpasar 80111

E-mail : bps5103@telkom.net

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

SAMBUTAN KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BADUNG

Om Swastyastu

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas Asung Kerta Wara Nugraha-Nya, Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Badung Tahun 2009 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

IPM ini disusun untuk dijadikan bahan evaluasi tentang sejauh mana pencapaian pembangunan manusia, dilihat dari sisi pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi/daya beli masyarakat. Dengan memahami kondisi masyarakat secara faktual maka diharapkan mampu dihasilkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Output atau keluaran dari laporan ini adalah berupa nilai IPM beserta komponen-komponennya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan data dan informasi selama proses penyusunan laporan IPM ini. Mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam pembangunan di Kabupaten Badung.

Om, Shantih, Shantih, Shantih, Om.

Mangupura, September 2010

Kepala Bappeda Litbang

Kabupaten Badung

I Wayan Suambara, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631025 198810 1 002

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya, Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung Tahun 2009 dapat diterbitkan sesuai dengan rencana.

Publikasi ini merupakan publikasi kedua dengan menyajikan beberapa informasi capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Badung ditinjau dari sisi pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi/daya beli masyarakat.

Upaya penyempurnaan publikasi telah dilaksanakan namun disadari masih ada kekurangannya, untuk itu kritik dan saran penyempurnaan kami terima dengan senang hati.

Kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya publikasi ini kami sampaikan terima kasih dan semoga publikasi ini ada manfaatnya.

Om, Shantih, Shantih, Shantih, Om

Badung, September 2010
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Badung

Ir. I GDE SUARSA, M.Si
NIP. 19550628 197903 1 002

DAFTAR ISI

Sambutan Kepala Bappeda Litbang	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	5
BAB II METODOLOGI	6
2.1. Arti dan Kegunaan IPM	6
a. Arti IPM	6
b. Kegunaan IPM	7
2.2. Sumber Data	8
2.3. Metode Penghitungan IPM.....	10
a. Penghitungan IPM	10
b. Indeks Harapan Hidup	12
c. Indeks Pendidikan	14
d. Indeks Hidup Layak	16
2.4. Ruang Lingkup dan Keterbatasan	20
BAB III TEMUAN DAN DISKUSI	21
3.1. Angka Harapan Hidup	21
3.2. Angka Melek Huruf	23
3.3. Rata-rata Lama Sekolah	25
3.4. Daya Beli Masyarakat	27
3.5. Indeks Pembangunan Manusia	29

BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	32
4.1.	Kesimpulan	32
4.2.	Saran	33

<http://badungkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM	11
Tabel 2.	Pemberian Skor Pendidikan	15
Tabel 3.	Komoditas Terpilih Untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)	18
Tabel 4.	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2005 – 2009	23
Tabel 5.	Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2005 – 2009	25
Tabel 6.	Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2005 – 2009 ..	26
Tabel 7.	Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2005 – 2009	28
Tabel 8.	Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2005 – 2009	30

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Angka Harapan Hidup, Tahun 2005 - 2009	22
Grafik 2.	Angka Melek Huruf, Tahun 2005 - 2009	24
Grafik 3.	Rata-rata Lama Sekolah, Tahun 2005 - 2009	26
Grafik 4.	Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan, Tahun 2005 – 2009	28

<http://badungkab.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan hendaknya dilakukan secara berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan kemampuan SDM dan SDA bagi kesejahteraan masyarakat

Pembangunan nasional menempatkan manusia sebagai titik sentral, sehingga mempunyai ciri-ciri dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam kerangka ini maka pembangunan nasional ditujukan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam semua proses kegiatan pembangunan.

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya dan tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Hal ini tampaknya merupakan suatu kenyataan yang sederhana, namun seringkali terlupakan oleh kesibukan jangka pendek yang berorientasi pada hal-hal yang bersifat materi.

Pembangunan manusia merupakan proses untuk memperluas pilihan yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Pemberdayaan penduduk ini dapat dicapai melalui upaya yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu meningkatkan derajat kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial budaya, dan politik. Pembangunan manusia seutuhnya tidak saja mencakup aspek fisik biologis, aspek intelektualitas, dan aspek kesejahteraan ekonomi semata, tetapi aspek iman dan ketaqwaan juga mendapat perhatian yang sama besar.

Paradigma pembangunan manusia mengandung 4 komponen utama:

Jumlah penduduk yang besar merupakan salah satu modal dalam pembangunan. Pada tahun 2009 jumlah penduduk Kabupaten Badung mencapai 424.228 jiwa terdiri dari 216.192 laki-laki dan 208.036 perempuan

- a) Produktifitas; Manusia harus berkemampuan meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi penuh dalam mencari penghasilan dan lapangan kerja. Oleh karena itu pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan manusia.
- b) Pemerataan; Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama. Semua hambatan terhadap peluang ekonomi dan politik harus dihapuskan. Sehingga semua orang dapat berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari peluang yang sama.
- c) Keberlanjutan; Akses terhadap peluang/kesempatan harus tersedia bukan hanya untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Semua sumber daya harus diperbaharui.
- d) Pemberdayaan; Pembangunan harus dilakukan oleh semua orang, bukan semata-mata dilakukan untuk semua orang. Semua orang harus berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Penyertaan konsep pembangunan manusia dalam kebijakan-kebijakan pembangunan sama sekali tidak berarti meninggalkan berbagai strategi pembangunan terdahulu, yang antara lain untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan mencegah perusakan lingkungan. Perbedaannya adalah bahwa dari sudut pandang pembangunan manusia, semua tujuan tersebut di atas diletakkan dalam kerangka untuk memperluas pilihan-pilihan bagi manusia.

Penduduk Kabupaten Badung pada pertengahan tahun 2009 berjumlah 424.228 jiwa atau mengalami pertumbuhan penduduk per tahun mencapai 1,89 %. Angka pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bali. Besarnya pertumbuhan ini tidak terlepas dari membaiknya sektor pariwisata sehingga Kabupaten Badung menjadi tempat yang cukup

Pembangunan manusia dilakukan melalui perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan upaya peningkatan kemampuan daya beli masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi

menjanjikan bagi pendatang/migran untuk memperbaiki kehidupannya.

Komposisi penduduk Badung dengan total mencapai 424.228 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 216.192 jiwa dan perempuan 208.036 jiwa. Hal ini merupakan tantangan dalam mewujudkan pemerataan atas hasil-hasil pembangunan sehingga dalam pencapaian tujuan pembangunan; peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja merupakan suatu keharusan.

Implementasi kebijakan ekonomi makro, adalah terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan disertai pemerataan hasilnya baik antar anggota masyarakat maupun antar daerah. Kebijakan seperti ini pada awalnya tampak hanya memberikan kesempatan kerja pada kelompok masyarakat tertentu, tetapi dalam jangka panjang hal ini akan menciptakan kesempatan kerja yang cukup besar. Dalam upaya pembangunan manusia perencanaan dan implementasinya dilakukan melalui berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, serta sektor perekonomian.

Sektor pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, diarahkan pada peningkatan kualitas serta pemerataan pendidikan. Dalam implementasinya arahan ini terutama meningkatkan kualitas pendidikan dasar, serta jumlah dan kualitas pendidikan kejuruan, sehingga memenuhi kebutuhan pembangunan daerah dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia Indonesia yang berkualitas, sehingga dapat menjadi modal utama pembangunan nasional dan menjamin masa depan bangsa.

Pembangunan sektor kesehatan yang merupakan bagian integral dari pembangunan sumber daya manusia, bertujuan mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, juga agar mempunyai derajat kesehatan yang tinggi tercermin dari harapan hidup yang tinggi. Untuk itu pembangunan kesehatan

juga ditujukan untuk menciptakan manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.

Pembangunan kesehatan memegang peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan manusia dalam setiap fase kehidupan. Disamping itu, pembangunan kesehatan juga berperan penting dalam pembangunan manusia, karena derajat kesehatan yang tinggi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas ini akan mempertajam kemampuan daya saing dalam dunia yang makin ketat persaingannya.

Upaya pembangunan perekonomian khususnya dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Badung dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya telah menunjukkan adanya peningkatan. Namun demikian masih ditemukan kehidupan ekonomi yang timpang sehingga kesenjangan sosial. Untuk itu diperlukan yang menuntut usaha yang sungguh-sungguh untuk mengatasinya agar tidak berkelanjutan dan berkembang ke arah yang menimbulkan kecemburuan sosial. Perluasan dan penataan dunia usaha masih perlu ditingkatkan dalam rangka menggairahkan kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat secara lebih merata melalui mantapnya iklim yang mendukung pembinaan dan peningkatan usaha informal seperti usaha kecil dan menengah serta kerja sama antara koperasi yang ada. Pada akhirnya keberhasilan sektor ekonomi dapat dilihat melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan serta daya beli masyarakat yang makin tinggi.

1.2. Tujuan

IPM dapat memberikan gambaran perbandingan antar daerah dan antar waktu sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan

Tujuan penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia melalui kondisi penduduk yang sehat dan berumur panjang, berpendidikan dan berketerampilan, serta mempunyai pendapatan yang memungkinkan untuk dapat hidup layak. Dalam perspektif pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, IPM tidak mencakup aspek pembangunan moral dan penanaman budi luhur bangsa yang merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Namun demikian sebagai suatu upaya dalam melakukan pengukuran tunggal dan sederhana dari upaya pembangunan, penilaian dengan indeks ini cukup memadai. Hal ini terutama karena dapat merefleksikan sejauh mana upaya dan kebijakan yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia, khususnya upaya pemberdayaan melalui pengentasan kemiskinan serta dalam peningkatan kualitas SDM dan partisipasi penduduk dalam pembangunan.

Namun disadari bahwa penggunaan indeks komposit hanya akan memberikan gambaran perbandingan antar wilayah kabupaten/kota serta perkembangan antar waktu. Dengan demikian IPM Kabupaten Badung hanya memperlihatkan perbandingan antar kecamatan di Kabupaten Badung. Sekalipun demikian penyajian indikator tunggal IPM ini sangat berguna dalam memberikan petunjuk tentang pencapaian sasaran sektoral yang menjadi acuan penting bagi perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Selain pengukuran menggunakan indikator komposit tersebut, keadaan dan upaya pembangunan manusia juga diukur dengan menggunakan beberapa indikator dari sektor pendidikan, kesehatan, serta sektor perekonomian, terutama dari komponen IPM itu sendiri.

BAB II

METODOLOGI

2.1. Arti dan Kegunaan IPM

a. Arti IPM

IPM merupakan salah satu indikator tunggal yang digunakan untuk membandingkan kualitas SDM antar wilayah dan antar waktu

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan suatu proses berjenjang dalam jangka panjang dan berbagai faktor sosial ekonomi ikut memberikan andil didalamnya. Proses pembangunan SDM ini merupakan interaksi berbagai komponen lintas sektor yang terjadi secara bertahap dari masa tradisional, masa perkembangan, sampai masa modern. Setiap tahapan pembangunan ditandai dengan adanya perubahan-perubahan yang meliputi berbagai indikator/ komponen sumber daya manusia dan ekonomi.

Untuk membandingkan tingkat perkembangan pembangunan manusia pada setiap daerah, setiap tahapan pembangunan atau setiap negara sejak lama telah diperkenalkan berbagai indikator pembandingan. Indikator yang dikembangkan merupakan indikator gabungan (komposit) yang tersusun dari beberapa indikator tunggal. Pembentukan indikator komposit merupakan teknik pengukuran karakteristik sosial individu atau kelompok masyarakat yang secara teoritis telah didefinisikan tetapi sulit diukur dengan definisi operasional.

Morris D. Morris (1979) mengembangkan *Physical Quality Life Index* (PQLI) atau yang dikenal luas dengan Indeks Mutu Hidup (IMH). Kemudian *United Nations Development Programme* (UNDP) juga mengembangkan *Human Development Index* (HDI) yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di Indonesia sejak dekade 1980-an telah dikenal beberapa indikator semacam ini seperti Indeks Mutu Hidup (IMH), Indeks Kualitas Manusia Indonesia (IKMI), dan lain-lain.

Sejak dikembangkan dalam suatu kesempatan bersama antara BPS dan UNDP, IPM menjadi salah satu indikator pembangunan yang penting di Indonesia. Di tingkat internasional IPM dipakai sebagai tolok ukur kemajuan yang telah dicapai oleh suatu negara setelah dibandingkan dengan negara-negara lain. Laporan ini mengambil pola yang sama dengan publikasi UNDP yang berjudul "*Human Development Report*", terutama konsep dan definisi, serta metodologi yang digunakan. Untuk tingkat nasional IPM dipergunakan sebagai tolok ukur antar propinsi dan di tingkat propinsi dipakai sebagai perbandingan antar kabupaten/kota.

Secara konseptual IPM adalah indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak. IPM merupakan alat ukur kinerja pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah atau secara lebih spesifik merupakan alat ukur kinerja dari pemerintahan suatu wilayah negara, propinsi atau kabupaten/kota (UNDP, 1990; BPS, 1997).

Berdasarkan definisi tersebut jelas bahwa IPM sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan di suatu tempat pada suatu waktu. Walaupun tidak dapat mengungkapkan semua dimensi pembangunan, IPM bisa digunakan sebagai salah satu petunjuk untuk melihat apakah arah pembangunan yang telah dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan.

b. Kegunaan IPM

Seperti diungkapkan sebelumnya bahwa indeks komposit digunakan sebagai cara pengukuran ciri masyarakat yang secara teoritis terdefinisi tetapi sulit diukur dengan definisi operasional. Prosedur pembentukan indikator seperti itu merupakan penerjemahan informasi ke dalam bentuk kuantitatif berupa angka tunggal yang terukur secara matematis. Dengan prosedur tersebut

IPM merupakan alat ukur kemajuan pembangunan manusia di suatu wilayah, kinerja pemerintah daerah sekaligus sebagai alat ukur dampak pembangunan

didapatkan bahwa indeks komposit akan memberikan deskripsi perbandingan antar wilayah serta perkembangan antar waktu, bukan memperlihatkan besaran yang dicapai. IPM juga bisa dipakai sebagai alat pemantau dan bisa dimanfaatkan dalam manajemen pembangunan karena bisa membandingkan perkembangan antar waktu sehingga dapat memperlihatkan dampak pembangunan yang dilakukan pada periode sebelumnya.

Pada level daerah IPM sebagai salah satu ukuran dampak pembangunan dimanfaatkan sebagai acuan oleh pihak berwenang setempat, terutama Pemda, dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pemanfaatan ini merupakan bagian dari instrumen makro perencanaan pembangunan daerah dan untuk monitoring serta evaluasi suatu wilayah dalam lingkungan propinsi. IPM dan komponen-komponen penyusun IPM bisa dimanfaatkan sebagai penilaian lintas sektoral terhadap hasil-hasil pembangunan daerah.

2.2. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan untuk penghitungan IPM dalam publikasi ini berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2007 baik data Kor maupun data Modul ditambah beberapa survei daerah. Di samping data tersebut juga digunakan data pendukung yang berasal dari sumber data lainnya. Susenas merupakan survei tahunan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia yang mengumpulkan data pokok (kor) dan modul. Data kor adalah data pokok rumah tangga dan anggota rumah tangga seperti status perkawinan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan/kegiatan seminggu yang lalu, keikutsertaan dalam keluarga berencana, perumahan dan pengeluaran rumah tangga. Untuk data modul, pengumpulannya dilakukan secara bergiliran dalam kurun waktu tiga tahun yaitu tahun pertama modul konsumsi dan pendapatan rumahtangga, tahun kedua modul kesejahteraan rumahtangga, sosial budaya, perjalanan

Sumber data utama yang digunakan dalam penghitungan IPM adalah data hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) serta data pendukung lainnya

dan kriminalitas dan tahun ketiga modul kesehatan, gizi, pendidikan dan perumahan.

Data modul konsumsi yang dikumpulkan dalam Susenas 2007 meliputi: Keterangan tentang konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, antara lain mencakup data rinci mengenai konsumsi rumahtangga, dan pengeluaran rumah tangga yang dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang.

Pertanyaan-pertanyaan yang dimasukkan dalam kor dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memonitor hal-hal yang mungkin berubah tiap tahun yang berguna untuk perencanaan jangka pendek, serta pertanyaan yang dapat dikaitkan dengan pertanyaan modul, misalnya pengeluaran. Pertanyaan yang dimasukkan dalam modul diperlukan untuk menganalisis masalah yang tidak perlu dimonitor tiap tahun atau analisis masalah yang ingin diintervensi pemerintah, misalnya kemiskinan dan kekurangan gizi.

Dengan berbagai keberhasilan tersebut data Susenas memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, untuk menggambarkan keadaan berbagai komponen kesejahteraan dapat disusun berbagai data agregat berupa indikator seperti tingkat partisipasi sekolah, persentase akseptor KB, rata-rata umur perkawinan pertama, rata-rata jumlah anak yang dilahirkan, persentase penduduk yang memanfaatkan fasilitas kesehatan, persentase balita yang diimunisasi dan diberi ASI, persentase rumah tangga yang memperoleh air bersih atau mempunyai jamban dengan tangki septik, dan rata-rata pengeluaran per kapita.

Data gabungan kor-modul dapat menghasilkan analisis untuk menjawab pertanyaan seperti, apakah kelompok miskin mendapat manfaat yang sesuai dari program pendidikan yang dilaksanakan

pemerintah (misal, program wajib belajar 9 tahun), siapa sajakah yang dapat memanfaatkan subsidi pemerintah di bidang pendidikan, apakah ada jenis-jenis alat KB tertentu yang lebih banyak dipakai penduduk miskin ketimbang yang lain, apakah penduduk miskin mendapat manfaat yang cukup dari program Posyandu, apakah ada kaitan antara jam kerja dengan fertilitas, dan apakah ada kaitan antara sanitasi dengan status kesehatan.

Dengan demikian jelas bahwa potensi yang terkandung dalam data Susenas dapat menutup sebagian besar kesenjangan ketersediaan data yang diperlukan para pembuat keputusan di berbagai bidang. Sekalipun demikian masih perlu dilakukan perumusan dalam perencanaan, pemantauan, atau evaluasi, kemudian merinci jawaban atau masukan yang diperlukan melalui data Susenas.

2.3. Metode Penghitungan IPM

a. Penghitungan IPM

IPM merupakan rata-rata dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan dan indeks standar hidup layak

IPM secara matematis adalah indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah) dan indeks hidup layak. Dalam menyusun indeks pembangunan manusia seperti diuraikan sebelumnya perlu ditetapkan nilai minimum dan maksimum dari masing-masing komponen, yaitu seperti terlihat pada Tabel 1. Perlu diketahui bahwa nilai maksimum dan minimum untuk komponen harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah sama seperti yang digunakan UNDP dalam menyusun IPM global sebelum tahun 1994. Batasan tersebut juga digunakan BPS dan UNDP dalam penyusunan IPM tingkat propinsi di Indonesia. Batasan selain konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan dalam laporan ini mengikuti batasan yang digunakan BPS untuk penyusunan IPM tingkat propinsi. Dengan demikian indeks angka harapan hidup dan indeks pendidikan memungkinkan untuk

dilakukan perbandingan baik tingkat nasional (propinsi dan kabupaten/kota) maupun internasional. Sementara untuk indeks konsumsi riil per kapita hanya mungkin dilakukan perbandingan antar propinsi dan kabupaten/kota saja.

Tabel 1. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM

Komponen	Satuan	Sasaran Ideal	Nilai Minimum	Target pencapaian (2) – (3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angka Harapan Hidup	Tahun	85	25	60
Angka Melek Huruf	%	100	0	100
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	tahun	15	0	15
Konsumsi riil per kapita yang telah disesuaikan 1999	Rp	732.720	360.000	372.720

Penyusunan indeks untuk setiap komponen IPM dapat dilakukan dengan menggunakan persamaan umum:

$$\text{Indeks } X1 = \frac{\text{Pencapaian selama satu periode}}{\text{Target pencapaian}}$$

$$\text{Indeks } X1 = \frac{X1 \text{ hasil pengukuran} - \text{Nilai } X1 \text{ minimum}}{\text{Target pencapaian}}$$

Berdasarkan persamaan indeks di atas, maka persamaan IPM dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{IPM} = \frac{\text{Indeks } X1 + \text{Indeks } X2 + \text{Indeks } X3}{3}$$

Dimana :

X1 = Indeks harapan hidup

X2 = Indeks pengetahuan (2/3 indeks melek huruf +
1/3 indeks lama sekolah)

X3 = Indeks hidup layak

b. Indeks Harapan Hidup

Angka harapan hidup menunjukkan rata umur penduduk mulai lahir sampai akhir hidupnya

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator pembangunan manusia. Dalam berbagai publikasi AHH merupakan bagian dari pembangunan di bidang kesehatan karena bidang ini berhubungan erat dengan meningkatnya umur hidup masyarakat. Perbaikan sanitasi lingkungan, kesadaran masyarakat tentang cara hidup sehat, dan pengobatan dengan cara medik secara langsung bisa memperpanjang usia hidup. Peningkatan umur hidup juga terjadi seiring dengan semakin majunya tingkat sosial ekonomi penduduk.

Secara konsepsi angka harapan hidup diartikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir hingga akhir hayatnya, dengan kata lain angka ini menunjukkan rata-rata umur penduduk mulai lahir sampai akhir hidupnya. Faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada angka harapan hidup adalah faktor lingkungan, status sosial ekonomi penduduk, keberadaan fasilitas dan tenaga kesehatan dan keadaan status gizi penduduk. Dalam konsep perencanaan pembangunan faktor-faktor ini selalu dibahas kaitannya dengan sektor kesehatan. Dengan demikian angka harapan hidup mewakili indikator kesehatan dalam menilai tingkat kesejahteraan penduduk.

Angka harapan hidup dapat dihitung dengan menggunakan tabel kematian (*life table*) dengan input data orang/penduduk yang meninggal berdasarkan kelompok umur. Penggunaan *life table* berhubungan dengan *cohort* peristiwa pada suatu waktu tertentu.

Angka harapan hidup minimal yang ditetapkan oleh UNDP adalah 25 tahun dan maksimalnya adalah 85 tahun

Selain dengan *life table* teknik penghitungan angka harapan hidup bisa pula dengan Program Mortpak. Penghitungan dengan program ini biasanya disebut penghitungan secara tak langsung karena menggunakan input data jumlah wanita usia 15-49 tahun per kelompok umur 5 tahunan. Selain jumlah wanita digunakan juga jumlah anak lahir hidup (ALH) dan jumlah anak masih hidup (AMH) menurut kelompok umur wanita 15-49 tahun sebagai data dasar.

Oleh karena AHH ini dipakai sebagai dasar untuk menghitung indeks kesehatan yang dianggap dapat menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan kesehatan maka perlu ditetapkan angka minimal dan maksimal.

- a. Angka minimal berdasarkan standar UNDP sebesar 25 tahun.

Dengan angka ini seseorang diharapkan dapat bertahan hidup sampai umur 25 tahun meskipun dengan fasilitas kesehatan yang minimal. Hal yang dipantau adalah seberapa jauh pemerintah dan masyarakat telah mengalokasikan sumber dayanya untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan berdampak pada naiknya angka harapan hidup penduduk negara tersebut.

- b. Angka maksimal harapan hidup yang juga merupakan standar dari UNDP dengan pengertian jumlah umur tertinggi yang masih mempunyai makna bagi seseorang dalam menikmati sisa hidupnya, dalam situasi sosio kultural sekarang adalah 85 tahun.

Dari nilai minimal dan maksimal tersebut dibentuk indeks harapan hidup yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Harapan Hidup} = \frac{\text{AHH hasil pengukuran} - \text{Nilai minimum}}{\text{Target pencapaian}}$$

c. Indeks Pendidikan

Angka Melek Huruf merupakan persentase penduduk yang mempunyai kemampuan dalam membaca dan menulis

Salah satu komponen IPM yang dipakai sebagai dasar penghitungan adalah pengetahuan (*knowledge*). Komponen ini diwakili oleh sektor pendidikan (*educational attainment*) dan merupakan salah satu komponen untuk mengindikasikan pembangunan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan merupakan manifestasi yang sangat jelas dari perbaikan kondisi hidup (*living standard*) suatu masyarakat pada suatu daerah, sehingga tingkat pendidikan yang lebih baik akan mendorong perbaikan kondisi sektor-sektor lain. Dalam IPM indeks pendidikan diwakili oleh komponen angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Kemajuan tingkat pendidikan salah satunya diindikasikan oleh angka melek huruf, dan indikator ini menunjukkan mutu sumber daya manusia. Dasar penghitungannya dengan membagi banyaknya penduduk yang bisa membaca dan menulis dengan total penduduk. Semakin tinggi nilai persentasenya maka semakin tinggi mutu sumber daya manusia dalam masyarakat.

a. Angka minimal untuk indikator ini adalah 0

Pendidikan memerlukan keputusan pengalokasian investasi. Peranan seluruh lapisan masyarakat, pemerintah dan swasta mutlak diperlukan dalam rangka pengalokasian dana dan sumber daya masyarakat lainnya secara terencana untuk penyelenggaraan pendidikan. Bila penduduk tidak mendapat kesempatan untuk mengikuti pendidikan maka dimungkinkan tercatatnya angka 0 pada indikator angka melek huruf.

b. Angka maksimal untuk indikator ini adalah 100 (persen).

Sebaliknya bila masyarakat dengan mudah mengakses pendidikan sehingga kemampuan baca tulis meningkat dimungkinkan bahwa angka melek huruf menjadi 100.

Dari kedua nilai tersebut maka target pencapaian adalah 100 – 0 = 100, sehingga indeks melek huruf bisa disusun menjadi:

$$\text{Indeks Melek Huruf} = \frac{\text{Nilai hasil pengukuran} - \text{Nilai minimum}}{\text{Target pencapaian}}$$

Rata-rata Lama Sekolah merupakan rata – rata jumlah tahun yang sudah dijalani untuk mengenyam pendidikan formal

Komponen lainnya dari indeks pengetahuan adalah rata-rata lama sekolah, yaitu jumlah tahun yang dijalani oleh seseorang dalam mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan; yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. UNDP dalam publikasinya *Human Development Report* (HRD) sejak tahun 1995 menghitung rata-rata lama sekolah dengan menggunakan indikator partisipasi sekolah dasar, menengah dan tinggi sebagai pengganti rata-rata lama sekolah karena sulitnya memperoleh data rata-rata lama sekolah secara global.

Cara yang sama akan digunakan dalam penulisan ini, dimana teknik ini secara sederhana digambarkan bahwa penduduk menurut tingkat pendidikannya diberikan skor. Setelah pemberian skor, kumulatif skor penduduk tersebut dibagi dengan seluruh penduduk sehingga didapatkan angka rata-rata lama sekolah. Pemberian skor dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pemberian Skor Pendidikan

No	Pendidikan Yang Ditamatkan	Skor
1	Tidak/belum pernah sekolah	0
2	Sekolah Dasar (SD)	6
3	SMP	9
4	SLTA/SMU	12
5	Diploma I	13
6	Diploma II	14
7	Akademi/D III	15
8	D IV/Sarjana	16
9	Magister (S2)	18
10	Doktor (S3)	21

Indeks lama sekolah dihitung dengan cara sama seperti indeks melek huruf yaitu:

$$\text{Indeks Rata – rata Lama Sekolah} = \frac{\text{Nilai hasil pengukuran} - \text{Nilai minimum}}{\text{Target pencapaian}}$$

- a. Angka minimal untuk indikator ini adalah 0

Lama sekolah ditentukan oleh pengalokasian sumber daya dalam menjalaninya. Bila masyarakat tidak atau belum mampu sama sekali menyekolahkan anaknya dengan berbagai alasan maka jumlah tahun yang dipakai untuk sekolah bisa nihil.

- b. Angka maksimal untuk indikator ini adalah 15

Sebaliknya bila akses terhadap pendidikan sangat mudah baik karena ketersediaan sarana sekolah maupun pendukungnya, maka secara teori seluruh penduduk bisa menyelesaikan pendidikannya minimal sampai perguruan tinggi setara Diploma 3 tahun (15 tahun bersekolah), sesuai dengan standar UNDP.

d. Indeks Hidup Layak

Indeks hidup layak merupakan cermin kemampuan daya beli riil masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok hidupnya

Standar hidup layak diartikan sebagai jumlah pengeluaran (uang) yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya per kapita per tahun. Oleh karena itu indeks ini diwakili oleh konsumsi riil per kapita, yaitu jumlah pengeluaran per kapita (rupiah) yang benar-benar dipakai untuk mengkonsumsi satu paket komoditi. Jenis pengeluarannya terbagi menjadi dua kelompok yaitu makanan dan non makanan, dalam hal ini terdiri dari 27 komoditi seperti dalam Tabel 3. Pemilihan komoditi tersebut menyesuaikan dengan sumbangannya terhadap total pengeluaran rumah tangga (dipilih 27 terbesar). Pertimbangan lainnya adalah bahwa komoditi yang terpilih harus dikonsumsi oleh seluruh rumah tangga sampel Susenas Modul. Hal ini dilakukan karena paket komoditi tersebut harus benar-benar mewakili konsumsi riil rumah tangga yang mengandung komponen makanan dan non makanan, termasuk 'life style'.

Penghitungan indikator konsumsi per kapita riil dilakukan melalui tahapan sebagai berikut;

- a. Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita dari Susenas Kor (=A)
- b. Menyesuaikan nilai A (*mark-up*) dengan data Susenas Modul (=B) Penyesuaian ini diperlukan karena data konsumsi Susenas Kor cenderung *underestimate*.
- c. Mendeflasikan nilai B dengan IHK propinsi yang sesuai (=C).

Hal ini dilakukan agar pengeluaran konsumsi dapat diperbandingkan antar waktu setelah dideflasikan terhadap tahun dasar yang sama.

- d. Menghitung daya beli per unit (=PPP/unit). Metode penghitungan sama seperti metode yang digunakan *International Comparison Project* (ICP) dalam menstandarkan nilai PDB suatu negara. Data dasar yang digunakan adalah data harga dan kuantum dari suatu keranjang komoditi yang terdiri dari 27 jenis yang diperoleh dari Susenas Modul.
- e. Membagi nilai C dengan PPP/unit (=D).

Langkah ini dilakukan agar nilai rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi mempunyai 'harga' yang sama antar wilayah.

- f. Menyesuaikan nilai D dengan formula Atkinson sebagai upaya untuk memperkirakan nilai marginal utility dari D. seperti diketahui nilai kepuasan riil dan jumlah pengeluaran membentuk fungsi tertentu yang tidak linier.

Penghitungan PPP/unit dilakukan dengan rumus:

$$PPP / Unit = R_l = \frac{\sum_j E_{(i,j)}}{\sum_j [P_{(g,j)} q_{(i,j)}]} , \quad j = 1, 2, 3, \dots, 27$$

Dimana:

$E(i,j)$: Pengeluaran untuk komoditi j di kabupaten/kota ke-i

$p(9,j)$: Harga komoditi j di DKI Jakarta

$q(i,j)$:Jumlah komoditi j(unit) yang dikonsumsi di kabupaten/kota ke-i.

Tabel 3. Komoditas Terpilih Untuk Menghitung Paritas Daya Beli (PPP)

Komoditi	Unit	Sumbangan terhadap total konsumsi (%)
1. Beras lokal	Kg	7.25
2. Tepung terigu	Kg	0.10
3. Ketela pohon	Kg	0.22
4. Ikan tongkol/tuna/cakalang	Kg	0.50
5. Ikan teri	Ons	0.32
6. Daging sapi	Kg	0.78
7. Daging ayam kampung	Kg	0.65
8. Telur Ayam	Butir	1.48
9. Susu kental manis	397 gram	0.48
10. Bayam	Kg	0.30
11. Kacang panjang	Kg	0.32
12. Kacang tanah	Kg	0.22
13. Tempe	Kg	0.79
14. Jeruk	Kg	0.39
15. Pepaya	Kg	0.18
16. Kelapa	Butir	0.56
17. Gula pasir	Ons	1.61
18. Kopi bubuk	Ons	0.60
19. Garam	Ons	0.15
20. Merica/lada	Ons	0.13
21. Mie instant	80 gram	0.79
22. Rokok kretek filter	10 batang	2.86
23. Listrik	Kwh	2.06
24. Air minum	M ³	0.46
25. Bensin	Liter	1.02
26. Minyak tanah	Liter	1.74
27. Sewa rumah	Unit	11.56
Total		37.52

Untuk kualitas rumah dihitung berdasarkan indeks kualitas rumah yang dibentuk dari tujuh komponen kualitas tempat tinggal yang diperoleh dari Susenas Kor. Ketujuh komponen kualitas yang digunakan dalam penghitungan indeks kualitas rumah diberi skor sebagai berikut :

- a. Lantai : keramik, marmer, atau granit = 1, lainnya = 0
- b. Luas lantai per kapita : $\geq 10 \text{ M}^2 = 1$, lainnya = 0
- c. Dinding : tembok = 1, lainnya = 0
- d. Atap : kayu/sirap, beton = 1, lainnya = 0
- e. Fasilitas penerangan: listrik = 1, lainnya = 0
- f. Fasilitas air minum : leding = 1, lainnya = 0
- g. Jamban : milik sendiri = 1, lainnya = 0
- h. Skor awal untuk setiap rumah = 1

Indeks kualitas rumah merupakan penjumlahan dari skor yang dimiliki oleh suatu rumah tinggal dan bernilai antara 1 sampai dengan 8. Kuantitas dari rumah yang dikonsumsi oleh suatu rumah tangga adalah indeks kualitas rumah dibagi 8. Sebagai contoh jika suatu rumah tangga menempati rumah tinggal yang mempunyai indeks kualitas rumah = 6, maka kuantitas rumah yang dikonsumsi oleh rumah tangga tersebut adalah $6/8$ atau 0,75 unit.

Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 C(i)^* &= C(i) && \text{Jika } C(i) \leq Z \\
 &= Z + 2(C(i) - Z) \left(\frac{1}{2}\right) && \text{Jika } Z \leq C(i) \leq 2Z \\
 &= Z + 2Z \left(\frac{1}{2}\right) + 3(C(i) - 2Z) \left(\frac{1}{3}\right) && \text{Jika } 2Z \leq C(i) \leq 3Z \\
 &= Z + 2Z \left(\frac{1}{2}\right) + 3(Z) \left(\frac{1}{3}\right) + 4(C(i) - 3Z) \left(\frac{1}{4}\right) && \text{Jika } 3Z \leq C(i) \leq 4Z
 \end{aligned}$$

di mana :

$C(i)$ = Konsumsi perkapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/unit (hasil tahapan 5)

Z = *threshold* atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan (biasanya digunakan garis kemiskinan) yang dalam laporan ini nilai Z ditetapkan

sebesar Rp.1500,- perkapita per hari atau Rp 547.500,- per kapita setahun.

2.4. Ruang Lingkup dan Keterbatasan

IPM hanya dapat mencerminkan keterbandingan antar wilayah dan antar waktu dan kurang dapat merefleksikan pencapaian sasaran program yang lebih berdimensi pemberdayaan manusia yang mendasar

Sebagai indikator tunggal, IPM merupakan alat ukur yang dapat dipakai untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah, sekaligus mengukur keberhasilan usaha pemberdayaan kemampuan sosial dan ekonomi penduduk wilayah tersebut. Disamping dapat mengukur peningkatan kualitas fisik yang dicerminkan oleh angka harapan hidup, juga mencakup pengukuran tingkat keterampilan dan keahlian melalui angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (indeks pengetahuan/pendidikan) dan kemampuan daya beli masyarakat.

Sebagai suatu alat ukur komposit dalam satu angka, IPM mengandung beberapa keterbatasan dalam penggunaannya. Pertama, karena merupakan hasil akhir dari serangkaian program di berbagai bidang, IPM kurang dapat merefleksikan pencapaian sasaran program yang lebih berdimensi pemberdayaan manusia yang mendasar. Oleh karena itu, IPM tepat bila dipakai untuk alat perencanaan bila didukung oleh indikator tunggal dari berbagai sektor pembangunan. Dengan demikian IPM sangat berguna dalam meningkatkan kesadaran (*raising awareness*) bagi perumus dan pengambil kebijakan pembangunan.

Keterbatasan berikutnya adalah bahwa IPM tidak menyatakan besaran apa-apa, kecuali perbandingan antar wilayah dan antar waktu. Oleh karena itu analisis yang bisa dilakukan selalu memakai kerangka keterbandingan antar waktu dan daerah. Untuk mengatasi kelemahan ini, laporan analisis yang disajikan dalam publikasi ini menyertakan pembahasan komponen IPM secara tersendiri, maupun hubungannya dengan variabel sosial-ekonomi.

BAB III

TEMUAN DAN DISKUSI

3.1. Angka Harapan Hidup

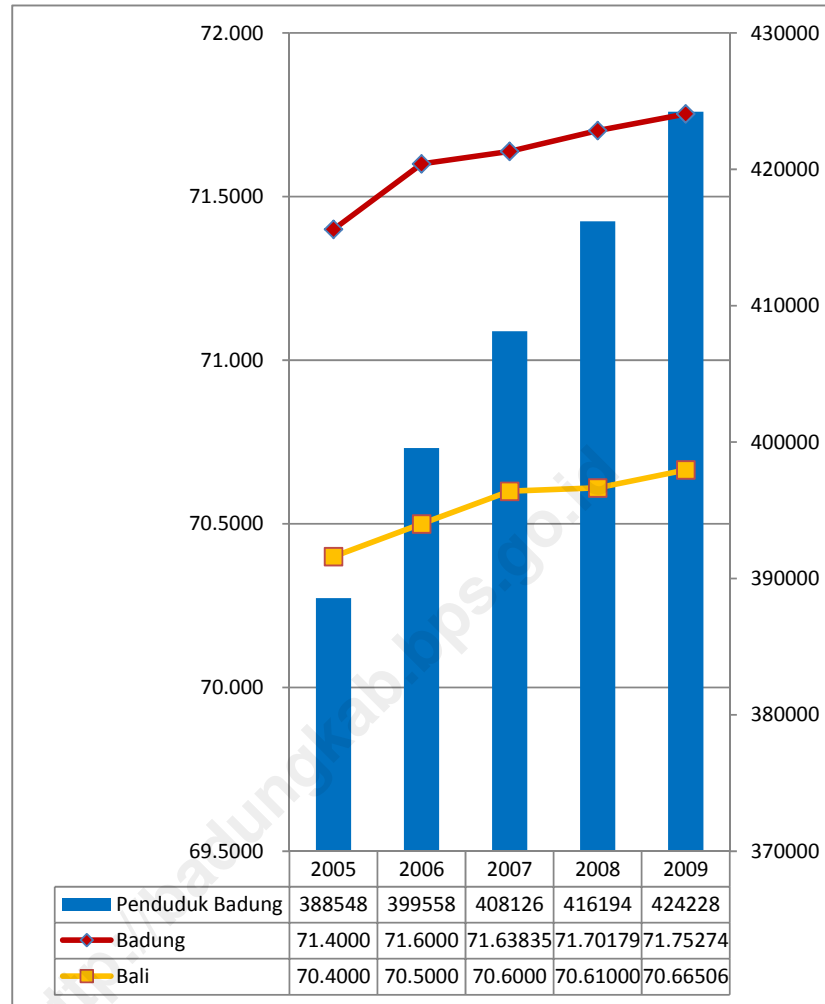
Tahun 2009, rata-rata harapan hidup penduduk Kabupaten Badung mencapai 71,75 tahun, di atas rata-rata harapan hidup Provinsi Bali yang hanya sebesar 71,67 tahun.

Dalam berbagai analisis demografi angka harapan hidup merupakan salah satu ukuran mortalitas yang penting. Angka harapan hidup adalah umur rata-rata yang akan dicapai oleh seorang bayi yang baru lahir. Indikator ini biasanya menjadi satu bagian yang saling mendukung secara berbanding terbalik dengan angka kematian bayi (IMR). IMR merupakan angka peluang atau probabilitas seorang bayi meninggal sebelum mencapai tepat umur satu tahun.

Pada tingkat makro, umur harapan hidup dipakai sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam bidang kesehatan. Peningkatan umur harapan hidup memberikan indikasi kompleks di berbagai bidang secara lintas sektor. Peningkatan itu bisa memberikan gambaran membaiknya kondisi sosial ekonomi penduduk, kesehatan dan lingkungan. Demikian pula sebaliknya, bila terjadi penurunan kondisi sosial ekonomi penduduk dalam satu periode pada akhirnya akan berakibat pada penurunan umur harapan hidup.

Seiring dengan terus membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi kesehatan masyarakat secara umum juga menunjukkan perbaikan. Salah satu indikasinya adalah dengan meningkatnya umur harapan hidup penduduk selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2005 harapan hidup penduduk Kabupaten Badung hanya 71,40 tahun. Angka ini meningkat menjadi 71,75 tahun pada 2009. Untuk lebih jelasnya *trend* angka harapan hidup dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 1. Angka Harapan Hidup, Tahun 2005 – 2009



Dari grafik di atas tergambar bahwa harapan hidup penduduk Kabupaten Badung secara umum berada di atas rata-rata harapan hidup penduduk Provinsi Bali. Namun demikian jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, Kabupaten Badung hanya menduduki posisi ke-empat di bawah Kabupaten Tabanan, Kota Denpasar dan Kabupaten Gianyar.

**Tabel 4. Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota,
Tahun 2005 - 2009**

No.	Kabupaten/ Kota	2005	2006	2007	2008	2009	Peringkat 2009
1	Jembrana	71,40	71,50	71,63	71,65	71,73	5
2	Tabanan	74,20	74,20	74,32	74,27	74,38	1
3	Badung	71,40	71,60	71,64	71,70	71,75	4
4	Gianyar	71,80	71,90	71,99	72,01	72,06	3
5	Klungkung	68,80	68,90	68,95	69,00	69,05	7
6	Bangli	71,30	71,30	71,40	71,47	71,56	6
7	Karangasem	67,60	67,70	67,77	67,80	67,85	9
8	Buleleng	68,20	68,40	68,65	68,78	68,96	8
9	Denpasar	72,70	72,80	72,85	72,91	72,96	2
	BALI	70,40	70,50	70,60	70,61	70,67	

Sumber: BPS Provinsi Bali

3.2. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas mengalami peningkatan dari 86,60 persen pada tahun 2005 menjadi 92,29 persen pada tahun 2009

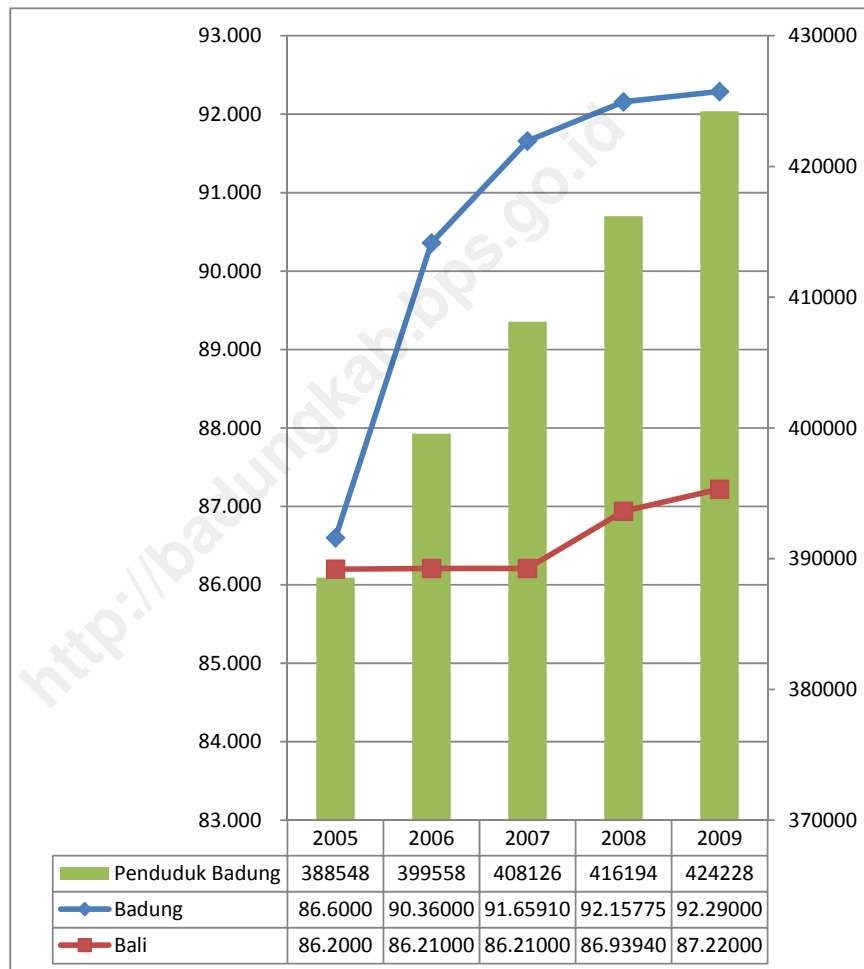
Dalam perkembangan suatu masyarakat, upaya peningkatan kualitas penduduk dapat dilakukan dengan meningkatkan standar pendidikan. Makin tinggi pendidikan masyarakat, makin luas pengetahuan dan wawasan penduduk sehingga semakin mudah menerima dan mengadopsi ide-ide baru terutama ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Salah satu indikator makro dan sangat mendasar dari sektor pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan ini diterjemahkan dalam bentuk indikator tunggal yang disebut angka melek huruf. Seseorang dikatakan melek huruf apabila ia memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau lainnya. Kemampuan membaca saja atau menulis saja belum memenuhi syarat untuk dikatakan melek huruf. Kemampuan membaca dan menulis yang digunakan dalam penghitungan IPM ini adalah untuk kategori penduduk usia 15 tahun ke atas.

Perbaikan tingkat pendidikan di Kabupaten Badung menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2005 hanya 86,60 persen penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf. Kemudian pada tahun 2009 angka ini meningkat menjadi

92,29 persen. Ini berarti hanya sekitar 7,71 persen penduduk yang buta huruf pada tahun 2009, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2005 dimana penduduk yang buta huruf sebanyak 13,40 persen. Terjadi peningkatan proporsi penduduk yang melek huruf yang cukup signifikan di Kabupaten Badung jika dibandingkan Provinsi Bali. Hal ini terlihat jelas pada grafik berikut ini.

Grafik 2. Angka Melek Huruf, Tahun 2005 - 2009



Dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, Kabupaten Badung berhasil menduduki posisi kedua dalam hal pemberantasan buta huruf yaitu di bawah Kota Denpasar. Hal ini tentunya merupakan prestasi tersendiri bagi Kabupaten Badung mengingat pada tahun 2009 hanya satu kabupaten dan satu kota saja yang pencapaian angka melek hurufnya mencapai di atas 90 persen.

**Tabel 5. Angka Melek Huruf Menurut Kabupaten/Kota,
Tahun 2005 - 2009**

No.	Kabupaten/ Kota	2005	2006	2007	2008	2009	Peringkat 2009
1	Jembrana	86,90	86,89	88,00	88,96	89,60	3
2	Tabanan	88,60	88,60	88,60	89,15	89,31	4
3	Badung	86,60	90,36	91,66	92,16	92,29	2
4	Gianyar	85,00	85,00	85,00	85,00	85,40	6
5	Klungkung	80,00	80,02	80,02	80,98	81,10	8
6	Bangli	81,50	82,11	82,11	82,11	82,23	7
7	Karangasem	70,50	72,06	72,14	72,14	72,27	9
8	Buleleng	87,60	87,60	87,60	87,60	87,84	5
9	Denpasar	96,50	96,50	97,04	97,14	97,27	1
	BALI	86,20	86,21	86,21	86,94	87,22	

Sumber: BPS Provinsi Bali

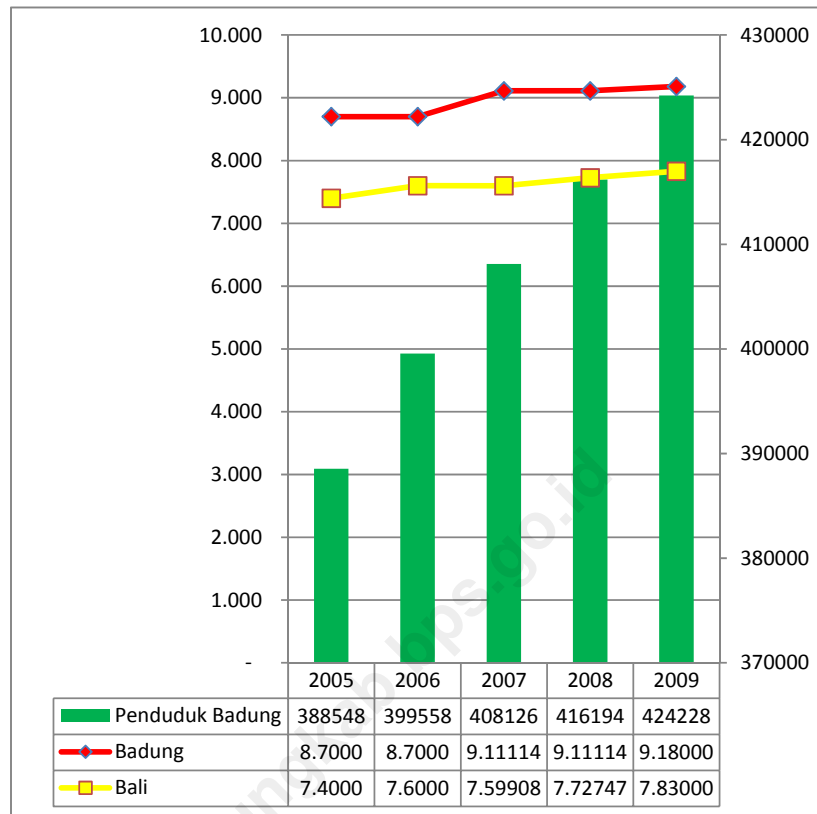
3.3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah terus mengalami peningkatan dari 8,70 tahun pada tahun 2005 menjadi 9,18 tahun pada tahun 2009

Sebagai bagian dari indikator pendidikan, lama sekolah bisa memperlihatkan tingkat pencapaian pendidikan yang ditempuh secara formal. Rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang telah dijalani penduduk untuk bersekolah. Semakin lama seorang bersekolah diasumsikan semakin baik kualitas orang tersebut.

Berbagai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah dalam bidang pendidikan telah membawa hasil yang positif. Sejak tahun 2007, rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Badung sudah berada di atas 9 tahun. Ini artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Badung telah mengenyam pendidikan formal selama 9 tahun atau setara dengan tamat SLTP. Hal ini tentunya merupakan prestasi yang harus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi sehingga diharapkan melalui program pemerintah daerah Wajib Belajar 12 tahun, kualitas SDM Kabupaten Badung dapat lebih ditingkatkan lagi.

Grafik 3. Rata-rata Lama Sekolah, Tahun 2005 - 2009



Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Badung yang mencapai 9,18 tahun pada 2009 berada jauh di atas rata-rata Provinsi Bali yang hanya sebesar 7,83 tahun. Meskipun demikian secara regional Kabupaten Badung hanya menduduki posisi kedua di bawah Kota Denpasar.

Tabel 6. Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2005 - 2009

No.	Kabupaten/ Kota	2005	2006	2007	2008	2009	Peringkat 2009
1	Jembrana	7,20	7,50	7,48	7,60	7,65	5
2	Tabanan	7,40	7,40	7,49	7,78	7,84	4
3	Badung	8,70	8,70	9,11	9,11	9,18	2
4	Gianyar	7,70	7,90	7,94	7,94	8,03	3
5	Klungkung	6,90	6,90	6,90	7,02	7,03	7
6	Bangli	6,50	6,50	6,50	6,50	6,52	8
7	Karangasem	5,00	5,40	5,37	5,37	5,41	9
8	Buleleng	6,30	6,60	6,73	6,89	7,09	6
9	Denpasar	9,90	9,90	10,25	10,47	10,49	1
	BALI	7,40	7,60	7,60	7,73	7,83	

Sumber: BPS Provinsi Bali

3.4. Daya Beli Masyarakat

Pengeluaran perkapita mengalami peningkatan dari Rp. 622,10 ribu rupiah/kapita/bulan pada tahun 2005 menjadi Rp. 635,33 ribu rupiah/kapita/bulan pada tahun 2009

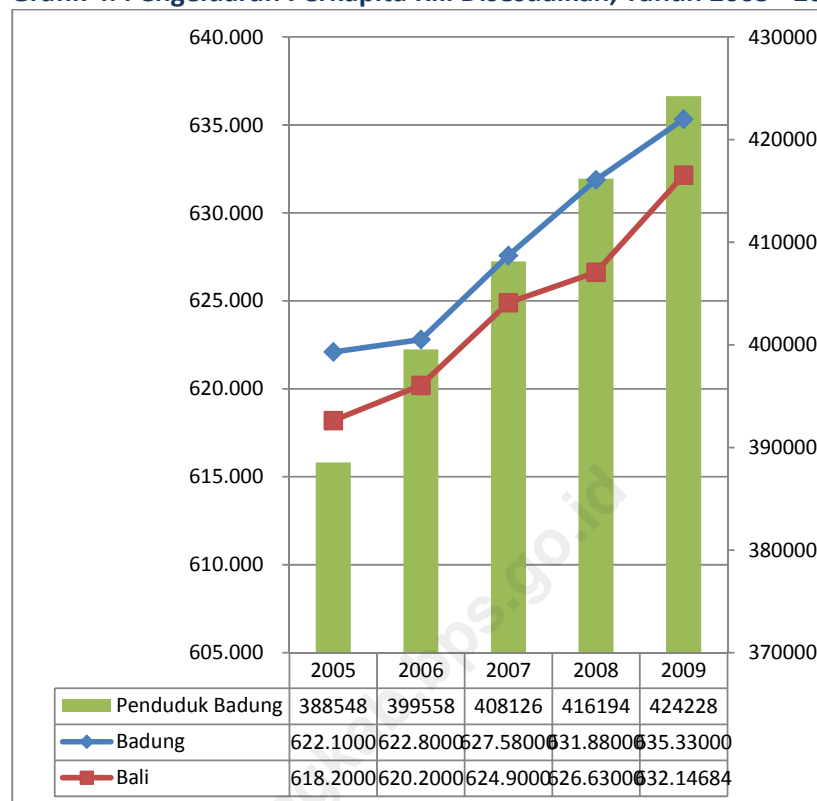
Kesejahteraan penduduk bisa dicerminkan oleh tingkat pendapatan yang diperoleh baik berupa uang, barang, maupun jasa. Dalam prakteknya pengumpulan data pendapatan sangat sulit dilakukan, oleh karena itu sebagai pendekatan digunakan data pengeluaran. Data pengeluaran berupa konsumsi makanan dan non makanan mencerminkan kemampuan ekonomi penduduk tersebut.

Banyak faktor yang menentukan tingkat pengeluaran seperti pendidikan, lapangan kerja, status sosial, ketersediaan sumber daya alam, dan lain-lain. Dalam level makro, penghitungan kesejahteraan ekonomi penduduk yang merupakan agregat dari tingkat pengeluaran individu, sering digunakan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pengeluaran per kapita yang dibicarakan diatas hanya memperlihatkan nilai nominal rupiah, artinya besaran yang dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan. Dalam realitanya nilai rupiah sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang terjadi, sehingga jumlah uang pada tahun tertentu nilainya tidak sama dengan nilai tahun sebelum atau sesudahnya. Oleh karena itu, dalam penghitungan IPM ini nilai pengeluaran telah dikoreksi dengan inflasi dan paritas daya beli. Dengan koreksi tersebut kesejahteraan yang diukur dengan pendapatan sudah benar-benar riil dan *comparable* antar tempat dan waktu.

Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan ekonomi, pendapatan masyarakat yang di-*proxy*-kan dari pengeluaran perkapita juga terus mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 2005 – 2009 pengeluaran riil perkapita penduduk yang telah disesuaikan menunjukkan kecenderungan peningkatan yang mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan penduduk walaupun belum mencapai hasil yang diharapkan.

Grafik 4. Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan, Tahun 2005 - 2009



Pada tahun 2009, pengeluaran perkapita riil disesuaikan Kabupaten Badung mencapai Rp. 635,33 ribu per bulan, sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Bali yang hanya sebesar Rp 632,15 ribu per bulan. Namun jika dibandingkan kabupaten lainnya, Kabupaten Badung hanya menduduki peringkat ke-enam, di bawah Kabupaten Klungkung, Karangsem, Kota Denpasar, Kabupaten Gianyar dan Bangli.

Tabel 7. Pengeluaran Perkapita Riil Disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2005 - 2009

No.	Kabupaten/ Kota	2005	2006	2007	2008	2009	Peringkat 2009
1	Jembrana	619,20	619,40	624,84	628,68	631,43	9
2	Tabanan	617,40	618,50	625,81	629,83	634,87	7
3	Badung	622,10	622,80	627,58	631,88	635,33	6
4	Gianyar	622,30	623,20	629,75	634,08	637,30	4
5	Klungkung	639,10	640,60	641,69	645,88	652,00	1
6	Bangli	620,30	621,60	627,65	630,57	635,76	5
7	Karangasem	623,70	627,10	637,09	641,30	648,01	2
8	Buleleng	618,80	619,30	625,52	629,77	633,40	8
9	Denpasar	618,30	623,60	630,69	635,43	639,43	3
	BALI	618,20	620,20	624,90	626,63	632,15	

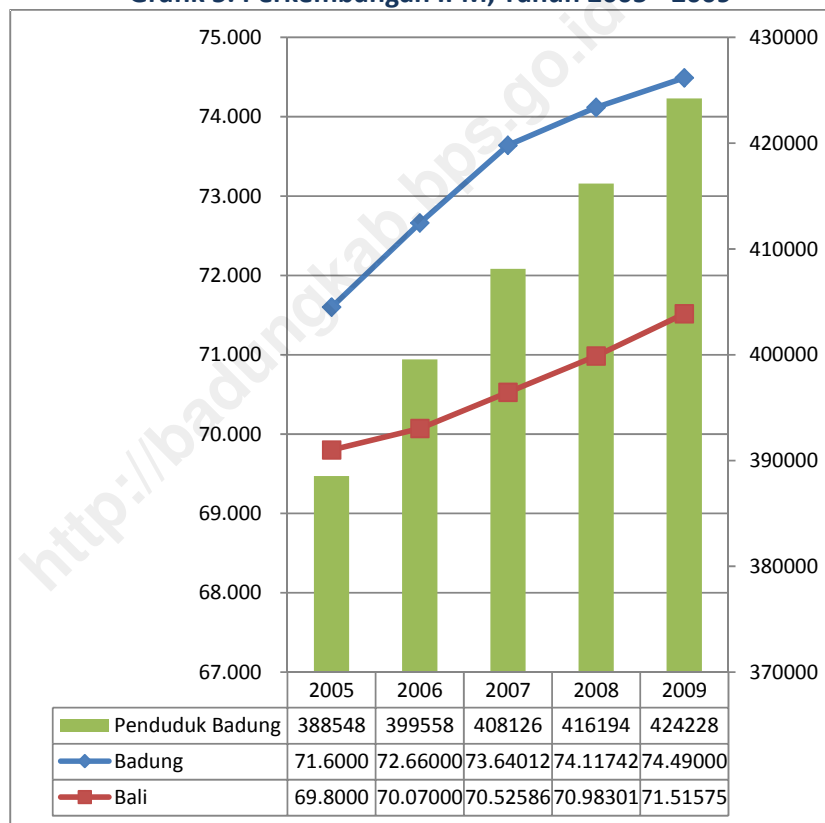
Sumber: BPS Provinsi Bali

3.5. Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kabupaten Badung pada tahun 2009 mencapai 74,49, berada di atas IPM Provinsi Bali yang hanya 71,52 dan berhasil menduduki peringkat kedua di bawah Kota Denpasar

Sebagai subyek dan objek pembangunan manusia merupakan titik sentral dari seluruh program pembangunan. Pembangunan manusia merupakan serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak dan sejahtera. Tujuan ini akan tercapai jika masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan, memperoleh pendapatan dan berusaha dalam bidang ekonomi, serta kesempatan dan akses terhadap seluruh sektor pembangunan.

Grafik 5. Perkembangan IPM, Tahun 2005 - 2009



Secara umum IPM sebagai indikator pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Badung menunjukkan nilai yang cukup baik jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bali. Pada tahun 2009 tercatat IPM Kabupaten Badung sebesar 74,49. Angka ini berada di atas IPM Provinsi Bali yang hanya sebesar 71,52. Secara regional Kabupaten Badung berhasil

menduduki peringkat kedua dalam hal pencapaian IPM, yaitu berada di bawah Kota Denpasar yang mencapai 77,56.

Tabel 8. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2005 - 2009

No.	Kabupaten/ Kota	2005	2006	2007	2008	2009	Peringkat 2009	Reduksi shorfall 2008- 2009
1	Jembrana	70,40	70,66	71,40	72,02	72,45	4	1,54
2	Tabanan	72,30	72,38	73,11	73,73	74,26	3	2,01
3	Badung	71,60	72,66	73,64	74,12	74,49	2	1,44
4	Gianyar	70,80	71,10	71,66	72,00	72,43	5	1,55
5	Klungkung	68,70	68,90	69,01	69,66	70,19	8	1,75
6	Bangli	68,70	68,94	69,46	69,72	70,21	7	1,60
7	Karangasem	63,30	64,29	65,11	65,46	66,06	9	1,74
8	Buleleng	68,10	68,41	69,15	69,67	70,26	6	1,95
9	Denpasar	75,20	75,65	76,59	77,18	77,56	1	1,66
	BALI	69,80	70,07	70,53	70,98	71,52		1,84

Sumber: BPS Provinsi Bali

Indikator lain yang perlu mendapat perhatian adalah reduksi *shortfall*. Reduksi *shortfall* per tahun digunakan untuk mengukur kecepatan perkembangan nilai IPM dalam suatu kurun waktu. Reduksi *shortfall* menunjukkan kecepatan perubahan jarak suatu IPM terhadap IPM ideal (IPM=100).

Selama periode 2008 – 2009 reduksi *shortfall* sebesar 1,36. Ini berarti masih dibutuhkan sekitar 17 tahun lagi bagi Kabupaten Badung untuk mencapai kondisi ideal (IPM=100) dengan asumsi kondisi pembangunan berjalan seperti saat ini. Nilai reduksi *shortfall* ini hanya menduduki peringkat terakhir dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Ini mengindikasikan bahwa kecepatan pembangunan manusia di Kabupaten Badung relatif masih rendah, paling rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Bali. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian pemerintah daerah terutama dalam hal perencanaan pembangunan untuk dapat lebih menekankan pada program-program peningkatan

kualitas sumber daya manusia sehingga kegiatan pembangunan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Perbaikan pembangunan manusia tidak hanya ditunjukkan oleh besaran nilai IPM saja. Pemerataan pembangunan manusia antar daerah dapat tergambar dari nilai “polaritas” rentang nilai IPM tertinggi dengan nilai IPM terendah. Rentang nilai IPM pada tahun 2005 sebesar 11,90 sementara pada tahun 2009 menurun menjadi 11,50. Ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan pembangunan manusia antar kabupaten/kota di Provinsi Bali meskipun kesenjangan tersebut semakin lama semakin mengecil.

<http://badungkab.bps.go.id>

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Capaian IPM Kabupaten Badung menunjukkan angka yang cukup tinggi yaitu 74,49. Angka ini lebih tinggi daripada capaian IPM Provinsi Bali. Namun demikian kecepatan pembangunan manusia di Kabupaten Badung masih rendah

Pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap selama ini sudah menunjukkan hasil-hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Pada dasarnya pembangunan tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang terutama bidang sosial dan ekonomi.

Hasil pembangunan bisa diamati melalui beberapa indikator dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan masyarakat, dan lain-lain. Khusus untuk menilai atau mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia, indikator yang relevan digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara sederhana IPM dapat menggambarkan keberhasilan pembangunan pada suatu wilayah secara spesifik sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja dari pemerintah suatu wilayah tersebut.

Hasil penghitungan menunjukkan bahwa pada tahun 2009 IPM Kabupaten Badung sudah mencapai 74,49. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2008 yang baru mencapai 74,12. Dengan capaian ini Kabupaten Badung berhasil menduduki peringkat kedua jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Bali yaitu di bawah Kota Denpasar.

Kecepatan pembangunan manusia di Kabupaten Badung masih relatif rendah yang tercermin dari besaran reduksi *shortfall* yang hanya sebesar 1,44. Angka ini hanya menduduki peringkat terakhir dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali. Ini berarti kecepatan pembangunan manusia di Kabupaten

Badung adalah yang paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Bali.

4.2. Saran

Diperlukan kebijakan pemerintah yang bersifat terpadu dalam rangka memperbaiki derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan daya beli masyarakat

Berdasarkan pengamatan komponen IPM, didapatkan bahwa komponen yang perlu mendapat perhatian adalah tingkat kesehatan masyarakat dan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Upaya perbaikan sarana dan prasarana kesehatan akan lebih berhasil lagi jika dilaksanakan secara terpadu dan tepat sasaran. Sehingga tanggung jawab kesehatan tetap menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, penyelenggara kesehatan dan masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan. Di sisi lain perlu dipertimbangkan berbagai program pemerintah yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat misalnya melalui penyediaan lapangan kerja maupun intervensi harga kebutuhan bahan pokok.

Pemerintah daerah perlu lebih bijak dalam menentukan program-program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM. Pemerintah hendaknya dapat mengembangkan program kegiatan peningkatan kualitas SDM yang bersifat terpadu baik dari sisi kesehatan, pendidikan maupun peningkatan kemampuan secara ekonomi.

Beberapa hal yang belum terjawab dari hasil penghitungan ini, misalnya bagaimana hubungan antara IPM dengan sektor ekonomi, IPM dengan kelompok masyarakat dengan ciri sosial tertentu, dan lain-lain. Hal ini belum dapat terjawab secara memuaskan karena beberapa keterbatasan, baik teknis (data pendukung) maupun non teknis (dana dan waktu). Oleh karena itu, dimasa mendatang perlu dipikirkan untuk bisa menjawab hubungan-hubungan tersebut melalui penelitian yang lebih mendalam.

<http://badungkab.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung
Jl. Mulawarman No. 11 Denpasar 80111
Telp : (0361) 437519, Fax : (0361) 411887
E-mail : bps5103@telkom.net